

	News Title : Puteri Komarudin Pertegas Peran OJK Tindak 'Trading Binary Option'	
	Media Name : dpr.go.id	Journalist : sf
	Publish Date : 04 February 2022	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Puteri Anetta Komarudin (Anggota Komisi XI DPR RI)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Berita	Topic : Binary Option

Puteri Komarudin Pertegas Peran OJK Tindak 'Trading Binary Option'

03-02-2022 / KOMISI XI



Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: Prima/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mempertegas andil Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menindak maraknya praktik *trading binary option*. Pasalnya banyak masyarakat yang sudah menjadi korban dari *platform* ini. *Platform trading binary option* mengharuskan pengguna untuk menebak kenaikan atau penurunan harga suatu aset pada periode tertentu. Karenanya, hal ini membuat *platform* tersebut lebih mirip seperti judi daripada *trading*.

"Mereka (masyarakat) tergigit keuntungan besar secara cepat yang ditawarkan oleh para afiliasi. Namun, malah ternyata mengalami kerugian yang besar," ungkap Puteri dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (3/2/2022).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (Bappebti) pun telah melarang kegiatan *binary option* karena bertentangan dengan ketentuan opsi yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Bahkan, sepanjang 2021 Bappebti telah memblokir 92 *domain platform binary option*.

"Memang produknya berada dalam kewenangan Bappebti, namun transaksi keuangan efek ini juga menjadi ranah OJK seperti yang disampaikan Kementerian Perdagangan. Artinya, OJK juga memiliki peran untuk memberantas platform ini. Untuk itu, saya harap OJK dapat mengambil tindakan tegas dan terus perkuat kinerja Satgas Waspada Investasi bersama Bappebti agar entitas ilegal segera diblokir dan korban dapat diminimalisir," ujar Puteri.

Di sisi lain, Puteri juga menyoroti kinerja OJK dalam memberantas praktik pinjol ilegal dan rencana penerbitan revisi peraturan OJK terkait *fintech lending* atau POJK Nomor 77 tahun 2016. "Pemblokiran *platform* pinjol ilegal dan kebijakan moratorium pendaftaran *fintech lending* masih berlaku. Tapi, pinjol ilegal masih terus muncul. Artinya, kebijakan ini perlu segera dievaluasi keberhasilannya dalam melindungi konsumen dan menjaga kualitas industri," tandas Puteri.

Karenanya, penguatan dari segi regulasi juga harus memperkuat formulasi penanganan fintech ilegal yang lebih efektif. Termasuk tetap menjamin dukungan terhadap industri fintech secara umum agar dapat berkembang dan menjaga tata kelola yang baik," tegas politisi Partai Golkar ini.

Menutup keterangannya, Puteri juga kembali mengingatkan OJK untuk memperbaiki layanan pengaduan konsumen kantor perwakilan OJK di daerah. Hal ini dilakukan guna meningkatkan aksesibilitas konsumen terhadap layanan OJK tanpa perlu mengunjungi kantor pusat di Jakarta. (sf)